

GOOD CLEAN GOVERNANCE (GCG) DALAM KEPEMIMPINAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASTA BRATA

A.S. Kobalen¹, Andi Faisal Bakti²

¹ The Ministry of Religious Affairs, Indonesia

² State Islamic University Syarif Hidayatullah, Jakarta

Email: adenibinasmuji@gmail.com

Abstract

Public sector leadership in Indonesia has always been an issue that is at the center of the attention of the Indonesian people. This has emerged since the reformation (1998) which gave birth to many leaders who were not found in the New Order era. This study uses a qualitative approach. Data sources are generated from literature (literature) interviews, documentation, and observations. Data analysis techniques use analytical techniques from Miles, Huberman, and Saldana, which require components of analytical techniques whose data consists of data condensation, data presentation (data display) and drawing conclusions / verification (drawing and verifying Conclusion). The results are seen in 5 GCG perspectives of Andi Faisal Bakti (2000) and 8 principles of Asta Brata (Kakawin Ramayana). It was generally found that the leadership of Basuki Tjahaja Purnama (BTP / Ahok) as Governor of DKI Jakarta was very contradictory to the principle of ASA Brata (sun, moon, wind, wealth, ocean, fire, death, and rain) based on a GCG perspective that characterizes transparency, consistency, agility, accountability, and communicability.

Article Histori:

Submitted: 13/07/2018

Review: 16/07/2018

Editing: 24/04/2019

Publish: 29/04/2019

Keyword: *Asta Brata, Public Sector Leadership, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pemikiran mengenai kepemimpinan sektor publik bermula dari pandangan bahwa pemimpin publik yang baik dan ideal itu mengenali secara komprehensif baik mengenai dirinya sendiri maupun mengenai kondisi lingkungan serta aspirasi masyarakat. Selain itu pemimpin tersebut memahami perkembangan dan permasalahan sektor publik dalam berbagai bidang kehidupan utamanya dalam bidang

yang digelutinya, serta paradigma sistem manajemen dalam organisasi. Salah satu bentuk responsivitas pemimpin adalah memberikan solusi secara baik terhadap permasalahan, menjalankan tugas secara efektif, dan memiliki gagasan dan ide dalam berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, maka setiap pemimpin perlu memenuhi kompetensi dan kualifikasi

tertentu, terutama dalam menjalankan GCG.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari GCG yaitu dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 dan diperkuat dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. SK Menpan ini paling tidak menegaskan bahwa: pemerintahan yang baik dan bersih merupakan dambaan demi terciptanya kepastian hukum antara masyarakat dan penyelenggara dalam hal ini pemerintah.

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental (asas) yang harus diperhatikan, yaitu: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsibility (*responsiveness*), orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*).

GCG merupakan hasil akhir yang diharapkan dari proses kepemimpinan. Berbicara tentang kepemimpinan terutama dalam kaitannya dengan kepemimpinan bangsa Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dari filsafat kepemimpinan Nusantara yaitu Asta Brata, terutama bisa kita lihat pada masa kepemimpinan Orde Baru. Menurut Robertus dan Todung

(2016:10) Presiden Soeharto dalam menjalankan Orde Baru menggunakan filosofi Asta Brata.

Menurut Rai Sidharta (2009:2), Asta Bratamengandung prinsip kepemimpinan yang dibahas dalam Hikayat Ramayana, ketika Sri Rama memberi pelajaran rahasia kepemimpinan kepada Wibhisana pasca kekalahan Rahwana di Alengka. Kendati ini berasal dari khazanah Hindu, dalam literatur nusantara, Asta Bratasudah menjadi bagian dari kebudayaan kepemimpinan Nusantara, khususnya Jawa, yang menjadi pedoman para raja dan sultan jauh sebelum penjajahan Belanda di Indonesia.

Dalam kepemimpinan nasional di Indonesia, nampaknya kepemimpinan gubernur DKI Jakarta telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia dengan tampilnya Basuki Tjahaja Purnama (untuk selanjutnya BTP/Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, dengan sikap dan gaya kepemimpinannya yang kontroversial. BTP/Ahok menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pemilu tahun 2014. Sosok BTP/Ahok cukup menjadi sebuah fenomena, karena dia seorang putra Indonesia keturunan Tionghoa pertama yang duduk sebagai gubernur, bahkan gubernur ibu kota negara yang merupakan basis penduduk Muslim dari berbagai daerah Indonesia, khususnya suku Betawi. Isu bumiputeradan pribumi sempat mencuat di permukaan.

Kepemimpinan BTP/Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta berusaha membenahi wilayah Jakarta agar layak dan



nyaman bagi semua orang, namun tata cara dan langkah yang diambil kerap menuai kontroversi karena menggunakan langkah-langkah yang tidak lazim untuk tradisi Indonesia, sehingga pakar dari berbagai bidang keberatan dengan kepemimpinan BTP/Ahok.

Berangkat dari uraian diatas, makatulisan ini akan memotret BTP/Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam perspektif kepemimpinan Asta Brata dalam mewujudkan GCG.

METODE

Pendekatan kualitatif digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diperoleh dari data sekunder dan data primer pada objek permasalahan yang diteliti. Teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi dilakukan guna mengumpulkan data-data (informasi).

GOOD CLEAN GOVERNANCE (GCG) DAN URGENSI KEPEMIMPINAN PUBLIK: TINJAUAN TEORITIK

Good Clean Governance (CGG)

Jolle Demmer etal. (2004:1) dalam mengulas *good governance*, mengatakan bahwa GCG telah menjadi kata kunci utama dalam bantuan kebijakan dan pengembangan berpikir saat ini. Hal itu bahkan tampaknya telah dikembangkan pada pembangunan berkelanjutan oleh para pembuat kebijakan internasional. Konsep ini telah dianut oleh Bank Dunia, pemerintah di negara-negara Barat dan IMF. Untuk pinjaman negara, GCG adalah elemen pertama dari persyaratan pinjaman

yang diperlukan, dan juga menjadi persyaratan untuk penerimaan mereka sebagai peserta yang setara dalam ekonomi global.

Pada tahun 2000 GCG diterima sebagai komponen penting untuk mencapai perkembangan dan pengurangan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh para pemimpin dunia melalui deklarasi milenium PBB. Namun, GCG tidak berarti sebuah konsep univokal. GCG sering mengaburkan fakta bahwa konsep ini setidaknya mencakup tiga pandangan yang berbeda pada tahap pengembangan (Leftwich, 1993; WRR, 2001; Jolle Demmer, dkk 2004:2).

Pendekatan pertama dan yang paling dominan adalah manajerial atau teknokratik. Elemen utamanya adalah efisiensi, otoritas dan akuntabilitas negara. Untuk mencapai tujuan ini dengan meningkatkan iklim ekonomi, transparansi, aturan hukum, dan mekanisme, menangani korupsi merupakan masalah yang dianggap paling penting. Lembaga-lembaga publik dan pejabat harus dikendalikan dan bertanggung jawab berdasarkan fungsi. Perbaikan negara secara kualitatif ini diharapkan dapat berkontribusi jauh untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan kedua, istilah GCG tergolong wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum, istilah GCG memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian GCG tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) dengan istilah GCC. Bahkan, prinsip-prinsip GCG dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, perkumpulan olahraga di tingkat Rukun Tetangga (RT), organisasi kelas, hingga organisasi di atasnya.

Sementara Andi Faisal Bakti (2000:3) sebagai pendekatan ketiga, mengartikan GCG sebagai sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai level pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut akan tercapai jika keperintahannya dijalankan dengan prinsip efektif, efisien, jujur, setara, transparan, serta bertanggungjawab. Dalam karyanya yang lain, Bakti mengemukakan 5 (lima) unsur GCG, yang disingkat dengan S-I-F-A-T, yaitu: Siddiq (Transparansi), Istiqamah (Konsistensi), Fathanah (Aqilias/Intellegensi), Amanah (Akuntabilitas), Tabligh (Komunikabilitas).

Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka dapat penulis sederhanakan ke dalam lima unsur utama GCG, yaitu: *pertama*, transparansi: Lalolo (2003: 13) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Kedua, konsistensi. Prinsip konsistensi bermakna bahwa seorang pemimpin atau anggota lembaga pemerintah menjalankan pemerintahan dengan memiliki pendirian yang teguh. Konsistensi menggambarkan bahwa seseorang akan mewujudkan janji-janjinya sekalipun berhadapan dengan kesulitan-kesulitan pribadi. Bakti (2000: 333) juga menambahkan, apabila menghadapi lembaga lain, tentu seorang birokrat akan selalu memegang teguh pendirian yang telah menjadi keyakinan sebagai kebenaran hingga adanya bukti bahwa apa yang diyakininya itu dibantah dengan data lain.

Ketiga, inteligensi/agilitas. Sifat ini mengandung makna kecerdasan otak, hati, dan mental, ketangkasan dan kegesitan dalam berbagai hal.

Keempat, akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui: (1) usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsif pada identitas di mana mereka memperoleh kewenangan; (2) penetapan kriteria untuk mengukur penampilan (performance) aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Dan *kelima*, komunikabilitas. Komunikabilitas merupakan prinsip kepemimpinan, dimana pemimpin harus



memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, hormat (*respectful*), sopan dan santun.

Lima prinsip CGG di atas, penulis hubungkan dengan prinsip kepemimpinan *Asta Brata*. Terdapat beberapa versi *Asta Brata* yang menjadi acuan pemimpin dunia hingga ke nusantara, dan sampai sekarang masih dilestarikan, antara lain: *Pertama, Asta Brata* menurut *Kakawin Ramayana*. *Kedua, Asta Brata* menurut Yasadipura I (1729-1803 M) dari keraton Surakarta. Dalam Penelitian ini, peneliti membahas prinsip-prinsip *Asta Brata* menurut versi *Kakawin Ramayana*, yang didalamnya terdapat delapan prinsip *Asta Brata*, yaitu: pertama, *Surya Brata/Matahari* (Bersifat Bijaksana). Kedua, *Chandra Brata/Bulan* (Bersifat Memberi Rasa Nyaman). Ketiga, *Bayu Brata/Angin* (Bersifat Penggali Aspirasi Masyarakat). Keempat, *Kuwera Brata/Kekayaan* (Bersifat Pandai Mengatur Keuangan). Kelima, *Baruna Brata /Lautan* (Bersifat Penampung Saran). Keenam, *Agni Brata/Api* (Bersifat Pemberani). Ketujuh, *Yama Brata/Maut* (Bersifat Adil). Kedelapan, *Indra Brata/Hujan* (Bersifat Menyejahterakan).

Kepimpinan Publik dalam Konteks Administrasi Publik untuk GGC

Dalam membahas kepemimpinan publik, konsep administrasi publik menjadi penting dibahas. Hal ini dilakukan karena administrasi publik berkaitan dengan bagaimana suatu pemimpin publik yang fokus melayani kepentingan publik dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Menurut Akindele (1995), administrasi publik berusaha mempelajari tentang bagaimana administrasi sebuah

negara dikelola dan berfungsi. Di sisi lain secara lebih rinci menurut Nnoli (2003), administrasi publik berhubungan dengan pola aktifitas rutin sebuah organisasi, yang melibatkan pembuatan keputusan, perencanaan, instruksi, koordinasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan sebagainya di mana suatu pemerintahan menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena itu, maka kepemimpinan sektor publik jauh lebih spesifik dibanding leadership secara umum. Van Wart dan Dicke (2008) mengemukakan beberapa tipe leadership sektor publik, yaitu organisasi, politik, dan gerakan. Morse (2007) membuat kategorisasi kepemimpinan publik berupa kepemimpinan politik (orang yang terpilih atau angkatan tinggi, pemimpin suatu lembaga pemerintahan), kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan nilai publik (di luar pemerintahan dan masuk ke governance).

Mark Tucci (2008) menyebutkan beberapa karakteristik penting kepemimpinan dalam sektor publik atau pemerintahan, yaitu pertama, membangun kesatuan tujuan (*building unity of purpose*) dengan cara berbagi visi; dan kedua melakukan klarifikasi arahan (*clarifying direction*) berupa langkah-langkah strategis yang diturunkan dari visi dan pola-pola aksi terukur. Jeffrey (2009:1) mengemukakan pandangannya terhadap kepemimpinan yang efektif, bersih, baik, dan berwibawa (GCG) yang memang sejak lama telah menjadi perhatian para ilmuwan. Ia menyatakan: "...as a result the importance of effective public sector leadership is multiplied, impacting millions of people (letak penting kepemimpinan sektor publik

bersifat mutiple, memberikan dampak kepada banyak orang). Menurut Hughes (1992), organisasi publik dibuat oleh publik, untuk publik, dan karenanya harus bertanggung jawab kepada publik.

Untuk melihat lebih real peran dan fungsi kepemimpinan publik, peneliti menggunakan paling tidak tiga pendekatan dalam administrasi publik (Lamidi, 2015), yaitu pendekatan klasik, pendekatan modern, dan pendekatan postmodernisme.

Pertama, pendekatan klasik. Pendekatan ini terfokus pada rasionalitas ekonomi para pekerja. Hal ini sejalan dengan asumsi Adam Smith yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh kepentingan ekonomi, dan mereka secara rasional akan mempertimbangkan peluang yang menjanjikan keuntungan terbesar bagi perekonomian mereka. Karena organisasi berhubungan dengan urusan ekonomi, maka individu biasanya menjadi sumber daya yang pasif untuk senantiasa dimanipulasi, dikontrol, dan dimotivasi oleh organisasi (Adam Smith, et.al: 2007). Berkaitan dengan teori klasik ini, menurut Lamidi (2015) terdapat tiga hal yang mesti digarisbawahi yaitu manajemen saintifik, prinsip adminisitratif, dan birokrasi organisasi.

Manajemen saintifik secara populer merujuk kepada manajemen saintifiknya Frederick Taylor. Ia merupakan orang yang memulai era manajemen modern. Ia secara serius berusaha menjatuhkan manajemen "by rule of thumb," dan menggantikannya dengan "the one best practice" (Self, 1976). Dia juga menganjurkan pelatihan sistematis untuk para pekerja dalam "the one best

practice" dengan tidak memberikan keleluasaan kepada mereka dalam tugas-tugas mereka. Taylor percaya bahwa beban kerja harus dibagikan antara pekerja dan manajemen dengan mengedepankan *science* dan instruksi, di mana pekerja harus menampilkan kerja keras, masing-masing kelompok mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan untuk memperoleh hasil yang paling tepat. Akibatnya, pendekatan ini dipandang sebagai dehumanisasi para pekerja.

Sementara itu, birokrasi organisasi yang berasal dari Max Weber menyatakan bahwa peradaban Barat merupakan pergeseran dari orientasi nilai pikiran, aksi afektif yang berasal dari emosi, dan aksi tradisional yang berasal dari masa lalu menuju pikiran teknokratik. Weber percaya bahwa peradaban telah berubah secara teknik dalam mencari hasil yang optimal dengan mengorbankan emosional-irrasional atau nilai-nilai kemanusiaan (Zima, 2007). Birokrasi ideal memiliki prinsip sebagai berikut, yaitu: resmi dan tetap secara hukum, memiliki hirarki kekuasaan dan subordinasi, memiliki manajemen berdasarkan dokumen tertulis, memiliki pelatihan yang cermat dan berkesinambungan, memiliki kegiatan resmi yang prioritas, dan mempunyai aturan yang dapat dimengerti. Birokrasi merupakan alat (mesin) yang ditujukan untuk mencapai sebuah tujuan.

Sedangkan teori administrasi yang berasal Henry Fayol fokus membahas tentang tugas personal manajemen dalam banyak tingkatan. Dengan kata lain, kerja manajemen lebih diarahkan pada lapisan-



lapisan manajemen (Smith, 2007). Fayol percaya bahwa manajemen memiliki lima prinsip peran, yaitu: meramalkan dan merencanakan, mengorganisasikan, memerintahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol.

Kedua, pendekatan modern. Teori administrasi modern lebih menekankan studi perilaku dan studi pemikiran kuantitatif. Teori manajemen modern telah mengubah cara administrasi publik melihat pekerjaan mereka (Denhart, 2008). Kemajuan dan perbaikan dalam teori dan praktik manajemen telah memungkinkan para manajer dan sistim manejerial untuk berkembang.

Dalam bahasa Katsamunska (2010), manajemen publik modern fokus pada bentuk manajemen objektif dan *peformance* (penampilan), penggunaan pasar dan pusat komando dan regulasi, persaingan dan pilihan, kesetiaan dengan barisan otoritas terbaik, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Pendekatan ini menekankan tiga E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Terdapat paling tidak tiga pendekatan dalam menjelaskan pendekatan publik modern dalam administrasi publik ini, yaitu pendekatan sistem, pendekatan struktural-fungsionalisme, dan pendekatan kontingensi. Pendekatan sistem menjelaskan bagaimana aktifitas administrasi dikoordinasikan dengan sebuah sistem dan sub-sistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Pendekatan sistem fokus pada sistem administratif dan menguji hubungan antara bagian-bagiannya yang banyak. Teori sistem juga menganalisis dinamika interaksi antara sebuah sistem administrasi dan lingkungan

eksternalnya. Selain itu, teori sistem melihat organisasi sebagai sebuah sistem kooperatif dan kolaboratif.

Adapun pendekatan fungsionalisme struktural berusaha melihat hubungan antara sub sistem pemerintah seperti hubungan antar unsur pemerintahan dengan tujuan yang dicapai melalui sebuah rencana institusional yang menampilkan fungsi secara khusus agar tetap *survive* dan beroperasi secara efisien. Teori ini mencoba melihat bagaimana struktur beroperasi dalam suatu masyarakat. Bagian-bagian dalam struktur atau beberapa institusi berkombinasi dalam menjamin keberlangsungan masyarakat sepanjang waktu. Pendekatan ini sejatinya muncul dari tradisi sosiologi di mana sebuah struktur merupakan sebuah pola tingkah laku yang menjadi sebuah ciri standard suatu sistem sosial. Fungsi dalam pendekatan ini berarti dampak dari sebuah struktur terhadap struktur lain dan kesalingterkaitan antar banyak struktur. Radcliff Brown berargumen bahwa pemikir sosial seperti Talcott Parson, Auguste Comte, dan Montesquieu melihat masyarakat sebagai sistem sosial dan mendeskripsikan mereka melalui analogi organisme. Selain itu, Fred Riggs cukup sukses mengaplikasikan fungsionalisme struktural-ekologikal dalam analisisnya mengenai sistem administrasi. Pendekatan ekologikal melihat interaksi antara sistem administrasi dengan lingkungannya.

Sementara itu, pendekatan kontingensi mengklaim bahwa tidak ada jalan terbaik dalam mengelola sebuah organisasi, memimpin perusahaan, atau membuat keputusan. Semuanya tergantung

dengan situasi internal dan eksternal. Asumsi dasar pendekatan kontingensi adalah bahwa lingkungan di mana sebuah organisasi beroperasi menentukan jalan terbaik untuk diorganisir (Betts, 2005). Karena itu, dalam teori kontingensi bahwa praktek terbaik tergantung dengan situasi.

Ketiga, pendekatan postmodernisme. Pendekatan ini dalam konteks administrasi publik dapat disebut sebagai administrasi publik baru yang bisa dirunut kepada tulisan Dwight Waldo (1948) dan dalam teori politik tulisan Sheldon Wolin (1960), yang mencoba menguji isu-isu yang melibatkan realisasi badan-badan publik yang efisien dan efektif melalui aplikasi beberapa model manajemen publik. Model tersebut memasukkan teori kewarganegaraan, model komunitas dan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan termasuk teori wacana (Denhardt, 2000). Pelayanan publik baru sebagai pendekatan postmodernisme dalam manajemen ini diaplikasikan dengan separangkat nilai baru, khususnya nilai yang umumnya berasal dari sektor private. *New Public Management* (manajemen publik baru) menolak adanya ukuran input dan lebih melihat *performance* tindakan untuk melakukan evaluasi. Dalam perspektif ini, pengelola perusahaan yang kreatif harus diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk memenuhi tujuan suatu program dan bahwa kesuksesan mereka akan diukur dengan *performance* dalam mencapai sebuah tujuan dari pada sekadar menghitung sumber daya (*input*) yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Konteks Kepemimpinan Ahok dalam Perspektif “Asta Brata” dan “Good Clean Governance (GCG)”

Surya Brata-Inteligensia/Agilitas

Surya Brata memiliki arti bijaksana. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus baik, memiliki kejujuran, serta bersikap positif pada rakyat, sehingga menimbulkan rangsangan dan kegairahan untuk mengabdikan kepada negara. Dengan sinar yang diberikan Surya, masyarakat akan merasakan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan prinsip agilitas dari nilai-nilai *good governance*.

Bagi sebagian warga Jakarta, terutama warga yang tinggal di bantaran kali dan waduk, kehadiran BTP/Ahok membawa malapetaka. Kebijakannya untuk mengurangi banjir di Jakarta harus ‘dibayar’ dengan penggusuran rumah yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka huni. Protes keras mereka lakukan demi bertahan dari kebijakan yang bagi mereka sangat merugikan. Sampai hal yang ekstrim dengan mendemo kediaman pribadi sang Gubernur pun mereka lakukan.

Global TV dan MNCTV pada tanggal 25 Mei 2015 memberitakan bahwa warga Pinansia Jakarta Barat dan warga Pademangan Jakarta Utara menyerbu kediaman pribadi BTP/Ahok. Massa menuntut penolakan rencana penertiban bangunan di bantaran kali Ciliwung di wilayah Pinansia dan Pademangan. Tidak sampai di situ, esok harinya mereka mendatangi Balai Kota untuk bertemu langsung dengan BTP/Ahok. Ketika bertemu dengan BTP/Ahok, para warga



dihadapi dengan sikap emosional BTP/Ahok. Bukan mendapatkan solusi, warga malah mendapatkan serangan balik dari BTP/Ahok karena kompleks perumahannya merasa dikepung dan terancam dengan kehadiran warga.

Tidak hanya masyarakat Pinansia dan Pedemangan, warga yang tinggal di sekitaran waduk peluit juga ikut serta digusur. Bagi BTP/Ahok penggusuran tersebut untuk mengimplementasikan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembalian fungsi waduk Pluit sebagai daerah resapan dan pengendali banjir. Sebagai salah satu solusi mengurangi banjir di Ibu Kota Pemprov menganggap penggusuran sebagai hal yang wajar.

Bagaimanapun juga, karena penggusuran berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, tentu prosedur dan penyampaian harus dilakukan dengan cara yang baik. Kebijakan yang benar untuk pemerintah DKI Jakarta tidak tampak dipermukaan, sebaliknya isu tempramen atau emosional seorang BTP/Ahok yang lebih menonjol. BTP/Ahok sebagai pemimpin DKI belum memberikan kebahagiaan kepada sebagian warganya, terutama 'wong cilik'. Terlebih cara-caranya (komunikasi dan prosedur) masih menimbulkan demonstrasi sebagai bentuk protes. Berdasarkan data yang ditemukan peneliti, di tahun 2014 saja korban penggusuran sekitar 13.852 orang, belum ditambah tahun 2015 dan 2016.

Chandra Brata-Komunikabilitas

Chandra memiliki arti bulan, dimana seorang pemimpin mampu

memberikan sinar terang di malam yang gelap. Makna lain dari sifat kepemimpinan ini adalah pemimpin memiliki sikap lemah lembut, ramah tamah, murah senyum, dan tidak mudah marah. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikabilitas yang menjadi prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks DKI Jakarta, BTP/Ahok memiliki sikap bertolak belakang 180 derajat dengan prinsip *chandra brata* ini seperti dalam beberapa kasus yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Transkrip Tayangan Media Televisi

No.	Uraian Kejadian / Tanggal
1.	BTP/Ahok memarahi anak buahnya (staf DKI) yang sedang rapat dengan para buruh di Balai Kota DKI Jakarta, karena mencatat hasil pertemuan/rapat dengan catatan tangan, tidak menggunakan laptop, dan menuding anak buahnya dengan kata-kata kampungan / 24 oktober 2014
2.	BTP/Ahok marah-marah di sekolah SMA negeri MH. Tamrin karena menganggap tidak ada orang miskin yang menjadi pelajar disekolah tersebut. Hal tersebut mendapat tanggapan dari kepala sekolah Jumadi yang menggap BTP/Ahok tidak memberikan contoh yang baik karena marah-marah di depan pendidik dan peserta didik / 14 November 2014

Sumber: dokumentasi liputan *TvOne* yang di tayangkan

Pemberitaan diatas menggambarkan bahwa orang yang bekerja bersama BTP/Ahok merasakan suasana tidak

nyaman. Lebih dari itu mereka merasakan ketakutan karena ada *punishment* yang diberikan BTP/Ahok, baik ancaman hambatan kenaikan pangkat sampai pada pemecatan.

BTP/ Ahok menginginkan bawahannya bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan, meskipun aturan yang ada tidak sama dengan apa yang dia pikirkan. Demikian juga dengan pengakuan Ichsan Rofiq, mantan Camat Johar Baru. Dia dipecat tanpa prosedur dengan tuduhan lisan menarik uang dari pedagang PKL. Bagi dia, BTP/Ahok tidak layak jadi pemimpin karena selalu melanggar peraturan.

Sifat *Chandra* tidak ada dalam sifat kepemimpinan BTP/Ahok tidak ada karena BTP/Ahok selalu hadir dengan sikap emosional, tidak hanya kepada staf dan media namun kepada masyarakat luas.

Bayu Brata-Komunikabilitas

Bayu brata adalah karakter pemimpin yang mampu memberikan kesejukan kepada manusia yang dapat menghindarkan manusia dari rasa gerah atau kepanasan. Dalam konteks ini pemimpin mampu menciptakan suasana kerja yang sejuk, suasana yang segar, sehingga terjalin suatu kerjasama yang baik. Pemimpin dalam konteks Bayu Brata juga diharapkan dapat mendorong seseorang hidup rukun, hidup dengan penuh toleransi atau timbang rasa, sehingga dijauhkan dari silang sengketa yang dapat menimbulkan percekocokan sampai kematian. Seperti prinsip sebelumnya, *bayu brata* juga sejalan dengan

prinsip komunikabilitas yang mesti dijalankan oleh suatu pemerintahan.

Berkaitan dengan sifat Bayu, figur BTP/Ahok bukanlah sosok yang memberikan kesejukan tidak hanya kepada stafnya, melainkan kepada masyarakat secara umum. Dengan ucapannya Ahok selalu menimbulkan kontroversi karena dia berbicara sesuai dengan keinginannya sendiri. Tidak hanya masalah program, isu sara dan agama pun dia tabrak. Dia berbicara seakan tanpa batas dan aturan.

Dengan demikian, figur BTP/Ahok tidak mampu mendorong seseorang untuk hidup rukun, lebih dari itu statemen-statemen BTP/Ahok sendiri yang menjadi pemicu lahirnya konflik, sengketa dan demonstrasi dari warganya.

Indra Brata-Akuntabilitas

Indra dalam *Kakawin Ramayana* bermakna perkasa/pelindung, sumber kesejahteraan merata, berjuang demi orang banyak, dan berani melawan kelaliman. Suhardana mengungkapkan pemimpin dalam konteks Dewa Indra Barata mampu melindungi orang-orang kecil dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Perlindungan yang diberikan akan dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. Nilai *indra brata* ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas atau pemerintah yang bertanggungjawab yang merupakan ciri *good governance*.

Selama kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, BTP/Ahok melakukan berbagai terobosan, salah satunya adalah pemindahan warga yang



tinggal di bantaran kali dan waduk ke rumah susun (Rusunawa). Tujuannya tidak hanya mengurangi banjir di Ibu Kota Jakarta yang disebabkan banyaknya bangunan liar di sepanjang kali, namun juga memberikan tempat yang layak bagi warga.

Sementara eks.warga penggusuran Kali Jodo, bekas tempat prostitusi, yang dipindahkan ke rusunawa Pulo Gebang Jakarta Timur dengan dalih lahan yang mereka huni sebelumnya tidak memiliki izin, mengalami masalah ekonomi setelah pindah tujuh bulan. Mereka hidup dari nol. Semenjak pindah mereka menggunakan uang tabungan mereka, namun setelah habis mereka mengalami kesulitan karena belum mendapatkan pekerjaan, terutama wanita di atas usia 40 tahun. Bagi masyarakat yang tidak bisa membayar, maka mereka akan keluar dengan sendirinya atau diusir.

Jika dikaji dari program pemindahan warga ke rusunawa akan terlihat bahwa yang dilakukan pemerintah hanya solusi sesaat, tanpa dipikirkan secara jauh. Targetnya adalah bantaran kali dan waduk bersih, kemudian untuk eks.warga yang tidak mampu setelah proses pemindahan harus menyelesaikan sendiri-sendiri.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa BTP/Ahok sebagai Gubernur belum bisa melindungi dan mengayomi masyarakat kecil. Kebijakan yang dia ambil hanya tampak bagus dipermukaan, namun pada tahap selanjutnya diserahkan kepada kemampuan warga. Seharusnya pemerintah juga menyediakan lapangan pekerjaan atau melatih skill dan kreatifitas

mereka, sehingga mereka yang dipindahkan tidak begitu saja kehilangan mata pencaharian, terutama wanita di atas usia 40 tahun dan tidak memiliki suami.

Baruna Brata-Konsistensi

Baruna Brata memiliki makna “menjaga ketenangan, menegakkan keadilan dan kebenaran, selalu waspada atas kemungkinan terjadinya gejolak atau kejahatan dan selalu menghukum siapa saja yang berbuat jahat.” Sifat kepemimpinan Baruna juga dapat diartikan bahwa pemimpin mampu menerima semua masalah, saran, dan menetralsir serta memberikan solusi terhadap semua masalah yang datang kepadanya. Dalam konteks *good governance*, prinsip ini sejalan dengan prinsip konsistensi di mana pemimpin harus senantiasa kokoh dan kuat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, konsisten antara ucapan dan perbuatan.

Semasa menjadi Gubernur, BTP/Ahok memberikan kebebasan kepada masyarakat umum untuk datang ke Balai Kota. BTP/Ahok pun setiap pagi menerima keluhan dari masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Tujuan dilakukannya program tersebut agar BTP/Ahok dapat mendengarkan langsung keluhan warga Jakarta. Untuk menertibkan program tersebut, pihak Pemerintah Provinsi DKI memasang pengumuman terkait ketentuan waktu, di mana tertulis untuk pengaduan pendaftaran sampai jam 07.30 WIB dan diberikan maksimal pendaftar sampai 30 orang. Sementara untuk pendaftaran berfoto dilayani sampai

jam 08.30 WIB dengan batas maksimal 1000 orang.

Model penyerapan aspirasi yang BTP/Ahok lakukan berdasarkan pengamatan peneliti, merupakan sebuah desain gerakan yang terorganisir. Program BTP/Ahok yang diberlakukan ini pada prinsipnya sangat bagus, karena dari program tersebut Pemprov dapat menyerap banyak *problem* yang dihadapi oleh masyarakat, dari masalah pendidikan, sengketa tanah, kesulitan menyewa rumah, dipecat menjadi petugas kebersihan DKI, hingga masalah pribadi warga yang tidak mampu berobat.

Dengan demikian, BTP/Ahok merupakan pemimpin yang memiliki sifat yang mampu menerima keluhan warga, namun belum bisa menetralsir atau memberikan solusi atas *problem* yang warga alami.

Kuwera Brata-Transpransi

Kuwera memiliki makna bahwa pemimpin memiliki kemampuan untuk menyelamatkan harta, mempergunakannya dengan adil, menyejahterakan rakyat, dan mengutamakan kinerja. Sifat ini dapat diinterpretasikan bahwa pemimpin mampu mengatur dan menggunakan Anggaran Belanja Pemerintahannya untuk kepentingan anggota atau rakyat yang dipimpinnya sesuai dengan prioritas. Hal ini jelas sangat sejalan sekali dengan prinsip transparansi yang menjadi nilai pemerintahan yang baik.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rapat Paripurna DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015,

ditemukan bahwa 6 program yang telah dilakukan pemerintah DKI telah merugikan negara sebesar 2,16 Triliun. Program-program tersebut antara lain: pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua; pengadaan tanah RS Sumber Waras tidakmelalui proses; penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT TJ; penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD; kelebihan bayar premi asuransi kesehatan; dan administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan BPK di atas menegaskan bahwa BTP/Ahok bukanlah pemimpin yang mampu mengatur dan menggunakan dana secara adil. Sebaliknya, dana yang keluar habis untuk dihambur-hamburkan tanpa ada pelaporan yang jelas. Selain itu, usaha BTP/Ahok mengumpulkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang berada di DKI sebenarnya dapat menguntungkan pemerintah DKI Jakarta, namun proses dan penggunaannya tidak dilakukan secara benar.

Agni Brata-Konsistensi

Agni bermakna bahwa pemimpin mampu menjadi cahaya penerang, panas untuk membakar kejahatan, pembela kebenaran, pembantu tanpa pamrih, serta berani bertindak sebagai ksatria dalam



melawan musuh. Seperti dijelaskan sebelumnya, sikap kokoh dan kuat dari seorang pemimpin sejalan dengan prinsip konsistensi dari pemerintahan yang bersih dan baik.

Unsur api yang ada pada BTP/Ahok terwujud dalam bentuk meledak-ledak untuk menyalahkan orang, tanpa melihat derajat atau jabatannya. BTP/Ahok sangat berani memarahi seorang pejabat di depan bawahan orang tersebut.

Tujuan seorang pemimpin memarahi bawahannya idealnya adalah untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik. Jika sikap marah dilakukan di hadapan orang banyak (didengar) terlebih kedudukannya jauh di bawahnya, maka *image* yang terbangun adalah menjatuhkan harga diri orang tersebut.

Yama Brata-Inteligensi/Agilitas

Yama memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus selalu berlaku adil, selalu menjaga kebenaran dan berani bertindak tegas untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang berbuat jahat dan salah. Dalam konteks penelitian ini *Yama* diartikan sebagai seorang pemimpin yang selalu menegakkan keadilan atas dasar tingkat perbuatan seseorang. Di dalam hal itu, dia tidak pernah memandang siapa dan dari mana. Karena itu, dia dijuluki dewa pencabut nyawa. Hukuman yang diberikan sesuai dengan sistem yang ada sesuai dengan konsep hukum karma pahala (perbuatan dan hasil). Di sini seorang pemimpin dituntut untuk bersikap cerdas dalam mengambil keputusan. Hal ini sejalan

dengan prinsip agilitas dari nilai-nilai pemerintah yang bersih dan baik.

Konteks *Yama* memiliki kelemahan dalam hal tidak mengkonfirmasi kesalahan bawahannya terlebih dahulu. Seharusnya dalam konteks menegakkan keadilan, harus melakukan *cross-check* terhadap orang yang bersangkutan. Demikian juga dengan pemberian hukuman yang semestinya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ANALISIS KEPEMIMPINAN BTP/AHOK DALAM KONTEKS KEPEMIMPINAN PUBLIK

Pendekatan Klasik

Pendekatan ini lebih terfokus pada rasionalitas ekonomi para pekerja. Hal ini sejalan dengan asumsi Adam Smith (2007) yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi oleh kepentingan ekonomi, dan mereka secara rasional akan mempertimbangkan peluang yang menjanjikan keuntungan terbesar bagi perekonomian mereka.

Jika teori ini dilihat dalam konteks pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok, maka dapat dikatakan bahwa tampaknya pemerintahan Ahok cenderung bersifat kaku dan semuanya diorientasikan untuk kepentingan ekonomi. Untuk tujuan materialistik ekonomi, para pekerja atau pegawai dipaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan sangat ketat dan teratur. Bahkan tidak jarang Ahok melakukan sidak di beberapa tempat dan ia pun tidak segan-segan memecat orang tertentu dari suatu jabatan ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Jika merujuk kepada

pandangan Smith jelas bahwa apa yang dilakukan Ahok terkesan memematikan rasa-emosional dan lebih mengedepankan rasionalitas.

Tampaknya Ahok yang menjadikan orientasi ekonomi di atas segala-galanya terjebak dalam istilah dehumanisasi manusia, seperti kritik yang dilontarkan kepada teori Frederick Taylor dalam kaitannya dengan administrasi publik klasik ini. Taylor menekankan apa yang disebut dengan "*the one best practice*" dengan tidak memberikan keleluasaan kepada para pekerja dalam tugas-tugas mereka. Taylor bahkan percaya bahwa beban kerja harus dibagikan antara pekerja dan manajemen dengan mengedepankan *science* dan instruksi, di mana pekerja harus menampilkan kerja keras, masing-masing kelompok mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan untuk memperoleh hasil yang paling tepat. Inilah pendekatan yang dilakukan oleh Ahok ketika ia memimpin DKI Jakarta.

Di sisi lain konteks kepemimpinan Ahok juga bisa dilihat dengan teori birokrasi organisasi Max Weber. Weber menyatakan bahwa peradaban Barat merupakan pergeseran dari orientasi nilai pikiran, aksi afektif yang berasal dari emosi, dan aksi tradisional yang berasal dari masa lalu menuju pikiran teknokratik. Weber percaya bahwa peradaban telah berubah secara teknik dalam mencari hasil yang optimal dengan mengorbankan emosional atau nilai-nilai kemanusiaan (Zima, 2007). Istilah "manusia mesin" adalah yang paling tepat untuk menggambarkan kepemimpinan Ahok di

Jakarta. Apa yang seharusnya menjadi nilai-nilai luhur, sopan santun, kelembutan dalam berinteraksi dengan bawahan hampir tidak terlihat dalam kepemimpinannya. Para bawahan ditarik ke dalam peradaban mesin di mana mereka digiring secara kaku dan penuh ancaman.

Pendekatan Modern

Katsamunskaja (2010) mengatakan bahwa manajemen publik modern fokus pada bentuk manajemen objektif dan *performance* (penampilan), penggunaan pasar dan pusat komando dan regulasi, persaingan dan pilihan, kesetiaan terhadap barisan otoritas terbaik, tanggungjawab, dan akuntabilitas. Dalam konteks UK, selama pemerintahan Thatcher terdapat usaha serius untuk mengaplikasikan tiga E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dalam segala level pemerintahan di Inggris.

Jika pemerintahan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta dilihat dengan perspektif ini maka dapatlah dikatakan bahwa Ahok memang mengedepankan objektifitas, penampilan, pengutamaan pasar sebagai basis ekonomi, mengedepankan persaingan, mengacu pada otoritas terbaik, tanggungjawab dan akuntabel. Usaha-usaha yang dilakukannya selama memerintah boleh dikatakan memang menampilkan sisi modern dari sebuah kerja administrasi publik.

Namun jika menggunakan model atau pendekatan sistem yang menjadi salah satu unsur dalam teori modern ini, maka administrasi publik pemerintahan Ahok dapat dikritisi. Pendekatan sistem berusaha menganalisis dinamika interaksi antara



sebuah sistem administrasi dan lingkungan eksternalnya. Pendekatan sistem juga melihat organisasi sebagai sebuah sistem kooperatif dan kolaboratif (Lamidi: 2015). Dengan pendekatan ini, tampaknya pemerintahan Ahok kurang memerhatikan lingkungan eksternal. Beberapa keputusan yang diambil seperti keputusan tentang penggusuran rumah penduduk terkesan membabi-butakan. Hal yang sejatinya menuntut keputusan yang kondisional ternyata kurang menjadi perhatian dalam administrasi pemerintahan Ahok. Penggusuran rumah penduduk hendaknya melihat kepada konteks kultural dan sosial yang berkembang di masyarakat. Karena umumnya masyarakat yang mendiami suatu tempat tidaklah dalam arti sekadar "tempat tinggal," tapi juga dalam arti sosial dan kultural. Ada kebudayaan dan pola kehidupan sosial yang telah mengakar di masyarakat yang kemudian terpaksa dipindahkan ke tempat baru. Hal ini tentunya mesti menjadi perhatian kebijakan publik.

Meski demikian, jika pendekatan fungsionalisme struktural yang juga menjadi unsur penting dalam teori modernisme ini digunakan untuk melihat pemerintahan Ahok, tampaknya Ahok telah menfungsikan sistem dan sub-sistem pemerintahan dalam memerhatikan kebutuhan prioritas masyarakat. Teori fungsionalisme-struktural ini mencoba melihat bagaimana struktur beroperasi dalam suatu masyarakat (Lamidi: 2015). Pendekatan fungsionalisme struktural-ekologikal yang digunakan Fred Riggs dalam menganalisis hubungan sistem administrasi dengan konteks lingkungan

yang mengitarinya, bisa membantu menjelaskan apa yang peneliti maksudkan ini.

Karena itu, dalam proses pengambilan keputusan yang berimplikasi pada kehidupan publik, peneliti sepakat dengan pendekatan kontingensi yang mengklaim bahwa semuanya tergantung dengan situasi internal dan eksternal. Lingkungan di mana sebuah organisasi beroperasi sangat menentukan jalan terbaik untuk diorganisir (Betts, 2005).

Ahok telah melakukan beberapa terobosan yang kiranya dapat dilihat sebagai bukti riil dari kerja fungsional-ekologikal. Layanan publiknya dalam menangani banjir, atau renovasi beberapa terminal, atau penataan ruang seperti relokasi Kampung Pulo, Kalijodo, Bukit Duri, Pasar Muara Karang, dan relokasi Pasar Ikan, atau pembenahan Pariwisata, adalah di antara konteks sosial mendesak yang telah ia jawab melalui program-program publiknya itu.

Karena itu, dapat ditegaskan jika dilihat dengan pendekatan modernisme ini, maka administrasi pemerintahan Ahok selama memerintah sebagai gubernur di DKI Jakarta dapat dikatakan berjalan sesuai dengan semangat modernitas. Meskipun dalam batas tertentu, penekanan berlebihan pada modernitas membuatnya terjebak pada beberapa klaim sosial dan kultural dari masyarakat yang tidak menyetujui beberapa programnya.

Pendekatan Postmodernisme

Menurut Denhardt (2000), pendekatan ini memasukkan teori kewarganegaraan, model komunitas dan

masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan termasuk teori wacana. Pendekatan postmodernisme ini lebih mememangkan nilai-nilai sosial yang umumnya berasal dari sektor private. Artinya dalam konteks ini state atau negara tidak lagi harus mendominasi dalam segala kebijakannya.

Pemerintahan Ahok di DKI Jakarta tampaknya berlawanan dengan prinsip pendekatan ini. Ahok boleh dikatakan kurang memerhatikan aspirasi warga dalam beberapa keputusan yang ia ambil. Penekanan pada rasionalitas membuatnya selalu tegang dan bahkan dalam batas tertentu tidak jarang berkonfrontasi dengan bawahannya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan sistem administrasi publik postmodernisme. Postmodernisme lebih menghargai potensi dan kreatifitas individu. Dalam konteks keputusan publik, masyarakat diberikan fleksibilitas untuk memilih antara setuju dan tidak setuju.

Tampaknya pendekatan *postmodernisme* dalam administrasi publik sangat penting diterapkan dalam konteks saat ini. Alasannya adalah bahwa pembangunan tidak lagi melulu menggunakan sistem *top-down* di mana pemerintah atau orang yang berkuasa menjadi penentu segalanya. Suara-suara demokratis dari masyarakat, LSM, dan potensi-potensi ormas-ormas yang bergerak secara kultural dalam masyarakat mesti dilirik sebagai potensi besar dalam pembangunan. Artinya seorang pemimpin tidak harus sombong dan arogan dalam setiap keputusannya. Dan Ahok seperti telah dijelaskan dalam beberapa bab terdahulu adalah sosok yang arogan dan

merasa dirinya paling berhak didengarkan, bahkan dalam kegiatan rapat ia sangat mendominasi. Hal ini jelas sekali menunjukkan kekurang-pengharganya kepada potensi bawahan yang sejatinya memiliki kebebasan untuk berpendapat.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan BTP/Ahok dinilai kontradiktif dengan prinsip Asta Brata, sehingga tidak mencerminkan pemerintahan yang GCG. Dan pada gilirannya, kepemimpinan BTP/Ahok juga memiliki banyak catatan baik secara administrasi publik klasik, modern, dan postmodern.

Meskipun demikian, kepemimpinan BTP/Ahok dapat diapresiasi dalam level dan konteks tertentu. Jika menggunakan pendekatan klasik yang berorientasi materialistik-ekonomi misalnya, maka apa yang diinginkan BTP/Ahok di Jakarta agar masyarakat terbebas dari kemiskinan merupakan hal yang patut diapresiasi. Hal ini tentu dengan catatan bahwa kepemimpinan Ahok cenderung tidak memanusiakan manusia.

Begitupula dengan menggunakan pendekatan modern. Pemerintahan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta jika dilihat dengan perspektif ini maka dapatlah dikatakan bahwa Ahok memang mengedepankan objektivitas, penampilan, pengutamakan pasar sebagai basis ekonomi, mengedepankan persaingan, mengacu pada otoritas terbaik, tanggungjawab dan



akuntabel. Usaha-usaha yang dilakukannya selama memerintah boleh dikatakan memang menampilkan sisi modern dari sebuah kerja administrasi publik.

Satu hal yang paling jauh dari kepemimpinan Ahok adalah pendekatan postmodernisme yang menekankan kebebasan dan fleksibilitas. Ahok adalah seorang yang kurang memberikan ruang gerak yang fleksibel bagi bawahannya. Akibatnya kepemimpinan terkesan otoriter.

Sebagai bahan perenungan, peneliti melihat bahwa dalam upaya menghasilkan pemerintahan yang bersih dan baik, suatu pemerintahan sebaiknya bergerak dalam ruang dan konteks di mana pemerintahan itu berada. Selain itu penting pula kombinasi antar pendekatan dalam memimpin sebuah pemerintahan. Artinya, pendekatan klasik, modern, dan postmodern seperti yang penulis paparkan di atas mestilah saling melengkapi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Akindele, S.T. 1995. The Issue of Macro Paradigmatic Influence in Comparative Political Analysis: A Critical Assesment." Dalam S.T. Akindele dan C.O. Ajila (eds), *Contemporary Issues in the Social Sciences*. Ile-ife: Transcradle Media Ltd.

-----, O.R. Olaopa dan S.A. Obiyan. 2002. "The Theory of Public Administration and Its Relevance to Nigerian Administrative Ecology." *Journal of Social Sciences*. Vol. 4. No. 6. Obafemi Awololo University, Ile-Ife.

Bacon, Jono. 2009. *The Art of Community*. O'Reilly Media, Inc. Sebastopol.

Bakti, Andi F., 2005. "Good Governance dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman. Dalam Hidayat, Komarudin dan Gaus AF, Ahmad. (Eds). *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina.

Bakti, AF. 2000 (Editor). *Good Governance in Indonesia: A Workable Solution for Indonesia?* Jakarta: IAIN Jakarta Press and Logos Publishing

Betts, S.C. 2005. "Contingency Theory: Science or Technology." *Journal of Bussiness and Economic Research*. Vol. 1. No. 8.

Bird, Richard M. dan Vaillancourt, François. (2008). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Brackertz, Nicola. 2013. "Political Actor or Policy Instrument? Governance Challenges in Australian Local Government". [Jurnal]. [diakses pada 13 juni 2014].

Calabro, Andrea. 2011. *Governance Structures and Mechanisms in Public Service Organizations: Theories, Evidence and Future Directions*. New York, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. (Editor). 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution Press, Washington D.C. USA.

Denhardt, R.B. 2008. *Theories of Public Organization*. Balmont: Thomson Wadsworth.

- Dull, Richard B. and Gelinas, Ulric J. Jr. (2008). *Accounting Information System*, Seventh Edition. USA: Thomson South-Western.
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B., 2007. *The New Public Service, Serving Not Steering*, Expanded Edition, Armonk, New York, London, England: M.E.Sharpe.
- Dryzek, John S.dkk (editor). 2006. *The Oxford Handbook Of Political Theory: Recognition and Redistribution* (Patchen Markell). Oxford University Press inc., New York.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Eaton, Joseph W. (Editor). 1972. *Institution Building And Development: From Concepts To Application*. Sage Publications, Beverly Hills, London.
- Falleti, Tulia G. (2005). *A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective*. American Political Science Review. Vol. 99, No. 3, August 2005
- Flanagan, W. G. 2010. *Urban Sosiology: Images and Structure*. Plymouth, United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012. "Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries: An Integrative Literature Review". *Journal of Management Policy and Practice* vol. 13(1)
- Haynes, Philip. 2003. *Managing Complexity In The Public Services*. Open University Press, Berkshire, England.
- Hoessein, Bhenyamin. 2003. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945. Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Denpasar Bali tanggal 14 - 18 Juli 2003 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
- Honneth, Axel. 1995. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
- Hemphill, J., and Coons, A. (1957). Development of the Leader Behavior Description Questionnaire. In R. Stogdill and A. Coons (Eds.). *Leader Behavior. Its description and measurement*. Columbus: Bureau for Bussines Research, Ohio State University.
- Heywood, Andrew. 2002. *Politics* 2nd ed. New York. Palgrave.
- Hughes, dkk. 2012. *Leadership: Memperkaya Pelajaran dari Pengalaman*, edisi 7. Jakarta: Salemba Humanika
- Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt. 2007. *The New Public Service, Serving Not Steering*, Expanded Edition, Armonk, New York, London, England: M.E.Sharpe.



- Katsamunska, P. 2012. "Classical and Modern Approaches to Public Administration." Diakses dari www.economicalternatives/edu/platform/org.
- Keohane, Robert O. 1988. "International Institutions: Two Approaches." *International Studies Quarterly*, Vol. 32, No. 4 (Dec.1988), pp. 379-396, Blackwell Publishing.
- Korten, David C. 1980. Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach. *Public Administration Review*, Vol. 40, No. 5 (Sep. - Oct., 1980), pp. 480-511. Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration, USA.
- Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV. Rajawali. Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Kartini, kartono. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamidi, Kazeem Oyedele. 2015. "Theories of Public Administration: an Anthology of Essays." *International Journal of Politics and Good Governance*. Vol. VI. No. 6.3. Quarter III, 1-35.
- Litvack, Jennie dkk. 1998. *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. The World Bank, Washington D.C., USA.
- Malhotra, C at all. 2007. "ICT for Rural Development: An Inclusive Framework for e-Governance". [Jurnal]. [diakses pada 14 2014].
- McNabb, David E. 2002. *Research Methods In Public Administration And Nonprofit Management: Quantitative And Qualitative Approaches*. Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Miller W.Lockley, Dickson, Malcolm dan Stoker, Gerry. 2000. *Models of Local Governance: Public Opinion and Political Theory in Britain*. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.
- Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Road Map Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. ITS Press, Surabaya.
- Nee, Victor. 2005. "The New Institutionalisms In Economics Sociology" dalam *The Handbook of Economic Sociology*, edisi kedua. Princeton University Press, New York.
- Nnoli, O. 2003. *Introduction to Politics*. Enugu: Pan Africa Center for Research and Conflict Resolution (PACREP).
- Nugraha. 2004. "Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah". [Jurnal]. [diakses pada 13 juni 2014].
- Nayeemul Islam, Khandaker. 2010. "Good Governance And Bureaucratic Leadership: Can 'Builders and Titans' Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in Bangladesh". *Series IV, Volume 1, No. 1, Fall*.
- Northouse, Peter G. 2013. *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Rainey, Hal G., and Barry Bozeman. 2000. Comparing public and private organizations: Empirical research and the power of the a priori. *Journal of Public*

- Administration Research and Theory 10:447-70. 88 Journal of Public Administration Research and Theory.
- Raadschelders, Jos C.N. et al. 2007. *The Civil Service in the 21st Century: Comparative Perspectives*. New York: Palgrave Macmillan
- Ramseook, P at all. 2010. "Service Quality in Public Service". [Jurnal]. [diakses pada 14 juni 2014].
- Roucek and Warren.1962. *Sociology: An Introduction*. Patterson Littlefield & Adams, London, UK.
- Robbins, P. Stephen and Timothy A. Judge, 2009, *Organizational Behavior*, 13th Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, pp. 209- 586.
- Robbins, SP. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Prenhallindo
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia
- Robertus Robet, dan Todung Mulya Lubis. *Politik Hukuman Mati di Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.
- Subagiasta, I Ketut. 2010. *Kepeimpina Hindu dalam Lontar Wрати Sasana*. Surabaya: Paramitha
- Suhardana, KM. 2008. *Niti Sastra. Ilmu Kepemimpinan atau Manajemen Berdasarkan agama Hindu*. Surabaya; paramitha
- Shah, Anwar (Editor). 2006. *Local Governance In Industrial Countries*. The World Bank, Washington, D.C. USA.
- Shah, Anwar, Edt. 2005. *Public Services Delivery*. Washington, D.C. The World Bank
- Soeharto, Sugiharto M. 2012. "Pelayanan Publik Aparat Pemerintah Desa Kepuh Kemiri Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Terhadap Kepentingan Warga Asli Dan Warga Perumahan". [Jurnal]. [Internet]. [diakses pada 12 Juni 2014].
- Sondang P. Siagian.1994. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PenerbitRhineka Cipta
- Sørensen, Eva dan Triantafillou,Peter (2009).*The Politics of Self-Governance*. Ashgate Publishing Company,Burlington,USA.
- Sukriono, Didik. 2008. "Politik Hukum Pemerintahan Desa". [Jurnal]. [diakses pada 8 juni 2014].
- Sukriono, Didik. 2011. "Politik Hukum Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis". [Jurnal]. [diakses pada 8 juni 2014].
- Suroso. 2011. "Kinerja Pelayanan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Pati". [Jurnal]. [diakses pada 13 juni 2014].
- Suwandi, Made. 2004. *The Indonesian Experience With The Implementation Of Regional Autonomy, dalam Alm, James et. al. 2004. Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and The Rebuilding of Indonesia*. Edward Elgar, United Kingdom.
- Shudharta, Rai. 2009. *Kepemimpinan Hindu Asta Brata dan Nasehat Sri Rama Lainnya*. Surabaya: Paramita Surabaya



- Thoha, Miftah, 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Treisman, Daniel. 2007. *The Architecture Of Government: Rethinking Political Decentralization*. Cambridge University Press, Cambridge United Kingdom.
- Triana, Rochyati Wahyuni. 2013. "Capacity Building In Local Government". [Jurnal]. [diakses pada 13 juni 2014].
- Van Wart, Montgomery. 2003. "Public-Sector Leadership Theory: An Assessment". *Public Administration Review* • March/April 2003, Vol. 63, No. 2
- Valery, R dan Shakir, S. 2007. "Evaluation Capacity Building and Humanitarian Organization". [Jurnal]. [diakses pada 14 juni 2014].
- Willems, Stéphane dan Baumert, Kevin. 2003. *Institutional Capacity And Climate Actions*. OECD, Paris, France.
- Wart, Montgomery van and Lisa A. Dicke. 2008. *Administrative Leadership in the Public Sector*. New York: M.E. Sharpe. Armonk.
- Waldo, D. 1980. "The Study of Public Administration" dalam R.J. Stillman (ed), *Public Administration: Cases and Concepts*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Zima, P.V. 2007. *What is Theory? Cultural as Discourse and Dialogue*. London: Continuum.
- UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.